

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pembaharuan dalam dunia Islam pada dasarnya tidak dapat terlepas dari pengaruh pemikiran Barat yang telah mencapai kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan yang terjadi di Barat selanjutnya membawa ide-ide baru ke dunia Islam seperti rasionalisme, nasionalisme, demokrasi, dan sebagainya. Sebagaimana di Barat, dunia Islam juga timbul pemikiran dan gerakan untuk menyesuaikan paham-paham keagamaan (Islam) dengan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern.¹ Dengan demikian, kita telah mengenal tokoh-tokoh pembaharuan di kalangan Islam seperti Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, Rasyid Rida, Hasan al-Banna, dan para pembaharu lain sesudah mereka.

Salah satu pembaharu di kalangan Islam khususnya di Mesir adalah Hasan al-Banna. Banyak ide-ide Hasan al-banna di bidang agama, politik, ekonomi, dan pendidikan. Karangan terpentingnya adalah *Majmu'at al-Rasail* yang dibukukan dalam satu kitab dan kitab *Muzzakirat al-Da'wah wa al-Da'iyah*. Salah satu idenya dalam politik adalah dibentuknya (gerakan) organisasi Ikhwanul Muslimin.

Ikhwanul Muslimin adalah salah satu gerakan Islam yang dibentuknya pada bulan Maret 1928 bersama enam orang temannya yaitu Hafizh Abd al-

¹ Ris'an Rusli, *Pembaharuan Pemikiran Modern dalam Islam*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 1986), h 185.

Hamid, Ahmad al-Hashri, Fuad Ibrahim, Abd al-Rahman Hasbullah, Ismail 'Iz, dan Zaki al-Maghraby. Mereka berkumpul untuk membahas kemajuan umat Islam. Mereka melihat bahwa kebudayaan Mesir telah merosot dan orang Islam di sana tidak mempunyai kedudukan (kemuliaan). Akhirnya, mereka memutuskan dan berikrar "kami bersaudara berdedikasi untuk kepentingan Islam. Oleh karena itu, kami adalah al-Ikhwan al-Muslimun."² Atau yang terkenal dengan sebutan al-Ikhwan al-Muslimun. Disamping itu, timbulnya gerakan ini karena krisis yang melanda Mesir di bidang agama, sosial, pendidikan, ekonomi, dan politik.³

Dalam perjalanan dan pertumbuhan organisasi ini, banyak sekali kontribusi yang diberikan kepada masyarakat, negara, bangsa, dan agama. Bukan hanya di Mesir saja yang mendapatkan ide-ide dan karya emas Hasan al-Banna tetapi juga menginspirasi munculnya cabang Ikhwanul Muslimin di Timur Tengah dan Asia Tenggara. Kontribusi tersebut dari dakwah di berbagai tempat dalam setiap kesempatan, di warung kopi, di tempat bekerja, di rumah-rumah, masjid-masjid, dan sebagainya. Dalam bidang sosial kemasyarakatan, Al-Ikhwan berusaha meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperbaiki lahan pertanian, menolong fakir miskin, menangani penerangan pedesaan bahkan mengelola hasil-hasil zakat. Al-Ikhwan mendirikan masjid-masjid, klinik-klinik kesehatan,

Di dalam bidang ekonomi Ikhwanul Muslimin ikut ambil bagian dengan mendirikan perusahaan tenun, pabrik pemitalan, mendirikan perusahaan dagang, dan bangunan. Dengan kegiatan ekonomi inilah Al-Ikhwan dapat membiayai aktivitas-aktivitas organisasi. Selain itu juga mendirikan sekolah-sekolah baik untuk putra dan putri, bahkan sejumlah sekolah terbuka bagi karyawan dan petani dalam rangka memberantas buta huruf. Al-Ikhwan juga dalam rangka menyebarluaskan cita-citanya juga cukup aktif dalam dunia penerbitan. Hasilnya dapat dilihat, surat kabar (al-Ikhwan al-Muslimun, mulai Maret 1946) dan berbagai majalah mingguan dan bulanan. Kontribusi ini pun berbuah manis dengan popularitas besar bukan hanya di Mesir dan di semua Negara berbahasa Arab. Setelah itu anggota Ikhwanul Muslimin sudah tersebar di 50 kota di seluruh Mesir. Dan karena perkembangan yang sangat pesat dan anggota yang luas, Al-Ikhwan pada tahun 1930-an mulai memasuki dunia politik akibat kondisi Mesir yang tidak menguntungkan di bawah pemerintah Inggris.

Mula-mula gerakan ini menekankan pentingnya pembangunan sosial, pendidikan, dan moral kaum muslimin, jadi merupakan suatu usaha reformasi dari yang sudah lama dirintis tokoh-tokoh seperti Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rasyid Ridha. Tetapi sistem organisasi yang diterapkan oleh Al-Banna sedemikian praktis dan modern sehingga Al-Ikhwan merupakan organisasi yang secara konkrit mencoba merealisasikan pikiran-pikiran pembaruan Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rasyid Ridha. Dan dalam

pendidikan, tetapi juga kekuatan sosial-politik yang selalu diperhitungkan baik sebelum maupun sesudah revolusi Mesir 1952 (M. Amin Rais, 1990: 75).

Pada saat awal berdirinya, anggota Al-Ikhwan hanya berjumlah sekitar 100 orang, tetapi di akhir tahun 1940-an anggota Al-Ikhwan telah mencapai 3000 orang. Pada awal perkembangannya, anggota gerakan ini menyebar ke berbagai Negara Arab seperti Suriah, Palestina, Yordania, Libanon, Irak, Yaman, dan sebagainya. Bahkan pada sekitar tahun 1948 gerakan Al-Ikhwan telah memiliki 2000 cabang dengan anggota dan simpatisan sekitar 500.000 orang yang mencakup hampir semua lapisan sosial di Mesir, termasuk dari kalangan angkatan bersenjata. Dan dewasa ini anggota dan simpatisan Al-Ikhwan telah menyebar ke berbagai wilayah di Asia seperti Indonesia, Malaysia, dan Jepang, bahkan menjadi lebih luas lagi ke berbagai penjuru dunia. Penyebaran Al-Ikhwan ke seluruh penjuru dunia dilakukan dengan sistem organisasi yang sangat rapi, bahkan gerakan ini kadang-kadang menyebar dengan nama lain, tetapi dengan suatu prinsip yang sama yaitu mengajak manusia ke dalam sistem Islam secara *kaffah* (menyeluruh) dan berupaya memukul mundur gerakan sekularisme. Di Indonesia, pengaruh ideologi Ikhwanul Muslimin direpresentasikan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

PKS merupakan partai yang diprakarsai oleh para aktivis dakwah kampus. Para aktivis yang sebagian besar berusia muda tersebut bergerak dari dalam kampus (umumnya kampus umum) dan dalam gerak dari dalam skala terbatas di sekolah-sekolah. Di kampus mereka mendirikan dan mengelola pengajian yang diarahkan ke arah Lembaga Dakwah Kampus (LDK). Lembaga inilah yang

menyelenggarakan berbagai aktivitas keagamaan, baik berupa pengajian-pengajian untuk mahasiswa, maupun pengajaran Islam bagi anggotanya. Pada masa awal (era pertengahan 1970-an hingga 1980-an), kegiatan para aktivis tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi, jika menyelenggarakan pengajian mengatasnamakan kegiatan mahasiswa. Kegiatan diam-diam ini dikenal dengan kegiatan "usroh". Usroh yang berarti keluarga, para anggota ini dibagi dalam satuan-satuan kecil (6-10 orang) dengan seorang mentor (murabbi) dalam sistem stesel.⁴

Bermula dari Masjid Salman ITB di bawah pendidikan Imaduddin Abdurrahim. Dan berkembang pula di UI, UGM, dan IPB. Mereka inilah yang kemudian menjadi dai-dai kampus masing-masing dan juga kampus-kampus lainnya.⁵ Para aktivis generasi awal LDK lebih berperan membangun jaringan ke perguruan-perguruan tinggi, sementara para alumni Timur Tengah berperan menjadi murabbi yang mengisi ceramah-ceramah dalam pertemuan-pertemuan tersebut. Para alumni Timur Tengah yang memiliki kelebihan dalam pendalaman keislaman serta penguasaan akan pikiran-pikiran Ikhwanul Muslimin menjadi ideolog-ideolog handal. Mereka dihadirkan dalam pengajian-pengajian dan menjadi tempat untuk bertanya dan berkonsultasi dalam berbagai masalah. Selain itu, mereka juga berperan dalam menyebarkan pemikiran-pemikiran Ikhwanul Muslimin di kalangan publik yang lebih luas. Mereka menjadi penceramah di

⁴ Imdadun Rahmat, *Ideologi Politik PKS: Dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen*, (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara Yogyakarta, 2008), hh 23-24.

⁵ *Ibid*, h 25.

radio, televisi, menulis buku, mengelola penerbitan, dan menjadi narasumber di seminar-seminar yang diikuti oleh kalangan luas.⁶

Intensitas pergulatan alumnus Timur Tengah meningkat ketika aktivis generasi ketiga angkatan Anis Matta, Aunurrofiq, Jazuli Juwani, dan Muhammad Syamlan berdatangan dari Timur Tengah maupun LIPIA Jakarta. Kehadiran generasi lebih muda lulusan Timur Tengah di gerakan Tarbiyah ini memberikan banyak kemajuan bagi persebaran jaringan dakwah dan kedalaman materi dakwah. Sejak mereka memperkenalkan pemikiran-pemikiran Ikhwanul muslimin, banyak mahasiswa yang kemudian lebih serius menekuni dan mendalami materi maupun *manhaj* dakwah Ikhwanul Muslimin. Kehadiran para alumnus Timur Tengah ini juga berkontribusi meumuskan sebuah sistem pengkaderan dalam konteks tarbiyah.⁷ LDK semakin berkembang pada tahun 1987, sebuah pertemuan yang dihadiri oleh wakil-wakil dari 30 LDK di Unair Surabaya. Pada pertemuan ini mulai digunakan nama Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus (FS-LDK).

Pada tahun 1998, merespon perkembangan politik Indonesia dengan membentuk organisasi formal bernama KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia), KAMMI didukung oleh para kader Tarbiyah ini menjadi salah satu kekuatan yang diperhitungkan saat gerakan mahasiswa menggulingkan rezim Soeharto.⁸ Pada bulan Agustus 1998, para kader Tarbiyah membentuk partai

kontra dikalangan mereka. Persoalan mendirikan partai ini menjadi agenda yang penting dibicarakan, sebagian mengatakan perlu mendirikan partai politik, sementara sebagian yang lain menyatakan tidak perlu. Persoalan ini kemudian menjadi pembahasan yang cukup panjang. Sebagian berpendapat bahwa era reformasi yang membuka keran kebebasan untuk berekspresi merupakan peluang yang baik untuk meningkatkan tahap perjuangan pada *mihwar siyasi*. Akan tetapi, sebagian menyatakan bahwa capaian yang diraih belum cukup untuk mewujudkan partai politik. Setelah ikut pemilu pada tahun 1999, PK tidak lolos dalam elektoral treshold yang membuat PK berganti nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera pada tahun 2003. Pada intinya, PK ini lebih berkompromi dengan demokrasi. Dan menggunakan demokrasi sebagai alat untuk memperjuangkan agenda politik mereka untuk memasuki parlemen.

Ternyata ada beberapa kesamaan antara PKS dan Ikhwanul Muslimin dalam gerakan tarbiyah dengan sistem usrohnya dan gerakan sosial. Seperti yang dijelaskan pada terbentuknya LDK, para alumnus Timur Tengah banyak mengadopsi pemikiran Ikhwanul Muslimin dan mengajarkannya dalam berbagai kesempatan kepada aktivis dakwah di kampus. Dalam pemikiran politikpun kita bisa melihat di dalam AD/ART PKS ada pengaruh atau tidak dengan Ikhwanul Muslimin.

Pemikiran politik merupakan pemikiran yang berkaitan dengan pengaturan dan pemeliharaan urusan rakyat. Merupakan pemikiran tertinggi, dibandingkan pemikiran sastra, pemikiran hukum, dan pemikiran faktual. Setiap gerakan

Pemikiran tersebut mungkin dapat dinamakan ideologi atau asumsi atau pandangan tentang hidup dan dunia (*weltanschauung*) yang dimiliki sekelompok orang tentang dirinya dan dunia sekelilingnya, dan hal itu sekaligus pembenaran dari segala tindakan yang diambilnya. Dalam tipologi pemikiran politik Islam. Ikhwanul Muslimin termasuk dalam kategori moderat. Karena, Ikhwanul Muslimin dalam konteks politik cenderung menilai demokrasi sebagai konsep yang tidak berseberangan langsung dengan Islam. Pemikiran Politik Islam moderat tentu ada diskursus didalamnya seperti demokrasi, syura, partai politik, kaderisasi, rekrutmen politik, dan sebagainya. Dan PKS merupakan transformasi gerakan sosial-keagamaan menjadi gerakan politik sama halnya dengan yang terjadi pada Ikhwanul Muslimin. Akan tetapi, diskursus dalam tipologi moderat masih sangatlah luas dan apakah ada pengaruh pemikiran politik Islam Ikhwanul Muslimin terhadap Partai Keadilan Sejahtera. Akan dibahas lebih detil dalam bab empat terkait poin-poin kesamaan dalam penjabaran pemikiran politik Islam dari keduanya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, permasalahan yang penulis rumuskan adalah:

1. Apa bentuk pengaruh pemikiran politik Ikhwanul Muslimin tentang Demokrasi dan Syura terhadap Partai Keadilan Sejahtera di Indonesia?
2. Bagaimana cara transmisi ideologi Ikhwanul Muslimin terhadap Partai

C. Kerangka Pemikiran/Teori yang digunakan

Untuk membedah objek pembahasan ini ada beberapa pisau teori dan konsep sebagai alat analisis. Dan tentunya dengan kadar penggunaan yang berbeda-beda.

Islamisme

Konsep yang dipakai di sini adalah Islamisme. Dalam buku "The Failure of Political Islam", Oliver Roy menggunakan terma Islamism dan Neo-Fundamentalism untuk menyebut gerakan Islam yang berorientasi pada pemberlakuan syari'at. Roy menyebut gerakan Islam yang menjadikan Islam sebagai ideologi politik dengan sebutan Islamisme. Sedangkan gerakan Islamisme yang telah bergeser ke arah pasivitas politik ia sebut sebagai neo-fundamentalisme. Roy menunjuk Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, Jama'ati Islami, dan Islamic Salvation Front (FIS) sebagai representasi dari terma yang dipakainya.⁹

Istilah Islamisme juga dipakai oleh Salwa Ismail untuk menunjuk dua fenomena sekaligus, baik politik Islamis maupun re-Islamisasi, sebuah proses domain yang beraneka ragam dari kehidupan sosial yang diselebungi oleh tanda dan lambang yang diasosiasikan dengan tradisi budaya Islam. Proses ini meliputi pemakaian jilbab, kebutuhan yang semakin besar pada bacaan dan literatur Islam serta komoditi agama lainnya, penampakan simbol-simbol identitas keagamaan,

literatur akhir-akhir ini, re-Islamisasi dimaksudkan lebih luas dari Islamisme kadang-kadang dibedakan dengan Islamisme. Sebab, menurut Salwa, Islamisme tidak semata-mata ekspresi dari proyek politik, tetapi juga meliputi penggunaan kembali bingkai dengan referensi Islam di wilayah Islam sosial dan kebudayaan.¹⁰

Untuk menggambarkan fenomena yang sama, pengamat menyebutnya *Islamist politic*. Istilah ini digunakan untuk menunjuk pada kegiatan organisasi-organisasi yang menggerakkan dan mengajak di wilayah politik, yang menggunakan tanda dan simbol-simbol dari tradisi Islam. Istilah ini juga dipakai untuk menunjuk pada aktivisme politik yang melibatkan kelompok-kelompok informal yang membentuk kembali *repertoire* dan bingkai-bingkai rujukan tradisi Islam. Istilah ini digunakan oleh Dale Eickelman dan Jamen Piscatori dalam buku mereka, *Muslim Politic*.¹¹

Konsep ini sangat menarik untuk melihat bagaimana PKS sebagai partai berideologi Islam merumuskan ideologi, strategi, ciri gerakan, agenda politik, dan paham keagamaannya serta pergeseran yang terjadi dalam proses penyesuaian diri dengan konteks sosial-politik dan budaya yang terus berkembang di negeri ini.

Teori Gerakan Sosial

Pisau Teori yang digunakan adalah Teori Gerakan Sosial. Menurut Quintan Wiktorowicz, dalam prisma kekayaan teori-teori gerakan sosial, perhatian tidak lagi berfokus pada ideologi, tapi lebih pada isu aktivisme keislaman (Islamic

¹⁰ *Ibid*, h 16.

¹¹ *Ibid*.

activism), mobilisasi yang menyertai munculnya gejala-gejala Islam politik. Teori-teori gerakan sosial memang mulai mendapatkan perhatian serius di tahun 1970-an ketika minat mempelajari aksi-aksi kolektif dan protes meningkat secara signifikan, sebagai respons terhadap meruaknya aksi-aksi turun ke jalan dari sekelompok aktor sosial yang berupaya menggugat kekuasaan elit, otoritas, ataupun lawan-lawan politik mereka atau yang lazim disebut *contentious politics*. Ketidakpuasan terhadap model strukturalis-fungsional gaya lama, yang terutama concerned dengan isu *grievance*, mendorong sarjana-sarjana gerakan sosial kontemporer seperti Mancur Olson, Mayer Zald, dan Anthony Oberschall mengusulkan "Teori mobilisasi sumber daya." Jika yang pertama menganggap aksi politik jalanan sebagai ekspresi mentalitas massa yang irrasional atau bentuk anomie dan deprivasi, teori mobilisasi sumber daya cenderung melihat gerakan sosial sebagai aksi kolektif rasional, terorganisasi, dan sadar tujuan.

Keberhasilannya pun sangat ditentukan oleh kecekatan aktor-aktor gerakan untuk mengorganisasi kekecewaan, meminimalisasi resiko yang mungkin timbul, sekaligus memanfaatkan jaringan-jaringan solidaritas sosial yang ada dan membagi insentif untuk mencapai konsensus bersama.

Teori gerakan sosial menawarkan jalan tengah antara mazhab strukturalis yang terlalu berfokus pada sistem (negara atau relasi internasional) dan mazhab pilihan rasional yang melebihkan peran individual. Berbeda dengan keduanya, teori gerakan sosial mengambil kelompok sebagai unit analisis. Sementara mengakui individu yang terlibat aksi kolektif memiliki pilihan bebas, teori

di luar konteks, relasi, dan jaringan yang berubah. Jadi, pilihan individu tidak bisa dipahami di luar konteks sosial kelompok. Oleh karena itu, teori gerakan sosial mengakui pentingnya perubahan struktural dalam menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya aksi-aksi kolektif. Aktor-aktor gerakan sosial bertindak dalam parameter-parameter perubahan semacam itu, meski tidak semua perubahan struktural membawa hasil yang sama. Dinamika bagaimana kelompok mengambil keuntungan dari sebuah perubahan sangatlah penting diperhatikan untuk memahami munculnya gerakan sosial.

Teori gerakan sosial memang memberikan tekanan khusus pada isu komunalitas gerakan yang berakar pada proses; bagaimana sebuah gerakan muncul dan kondisi apa yang memungkinkan suatu "kekecewaan" bermetamorfosis menjadi mobilisasi. Terdapat tiga konsep kunci dalam teori gerakan sosial yang biasanya memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan aksi-aksi kolektif. Ketiga konsep itu meliputi (1) struktur kesempatan politik (*political opportunity structure*), (2) struktur mobilisasi (*mobilizing structures*), dan (3) pbingkaiian aksi (*framing*). Konsep struktur kesempatan politik menjelaskan bahwa munculnya gerakan sosial seringkali dipicu oleh perubahan-perubahan signifikan yang terjadi dalam struktur politik dan karenanya, meredupnya gerakan itu juga biasanya berhubungan dengan pergeseran-pergeseran yang terjadi di dalamnya. Dengan kata lain, struktur kesempatan politik berdampak mempercepat terjadinya ataupun mengakhiri aksi kolektif. Namun, struktur kesempatan politik saja tidak cukup

yang biasanya berakar dalam jaringan-jaringan sosial yang sudah terbangun sebelumnya. Melalui jaringan itu massa dan simpatisan direkrut dan dimobilisasi. Keberadaan jaringan rekrutmen memang menjadi penentu dalam proses pelibatan individu, karena mobilisasi tidak berlangsung dalam ruang hampa. Untuk memobilisasi massa itulah aktor-aktor gerakan sosial perlu membingkai aksi-aksi yang mereka rencanakan dengan slogan-slogan dan bahasa yang mudah dipahami dan sekaligus dapat menggerakkan sentimen mereka. Di sinilah arti penting framing sebagai seni mengkomunikasikan pesan untuk menggerakkan audiens dan memompa dukungan serta partisipasi. Ideologi, sebagai sistem kepercayaan, ide, nilai, dan makna, biasanya bekerja untuk mendukung efektivitas pembikaaian ini.¹²

Teori gerakan sosial memberikan keuntungan bagi upaya memahami berbagai gejala Islam politik secara lintas-disiplin. Ia meneropong tidak saja dinamika kesejarahan, tapi juga proses dan organisasi aktivisme yang mengusung bendera Islam. Ia sekaligus memberikan pemahaman bagaimana dinamika, proses dan organisasi aktivisme keislaman itu dapat dipahami sebagai unsur penentu terjadinya aksi kolektif, yang bekerja melampaui keunikan Islam sebagai sistem makna, identitas, dan basis aksi kolektif. Meski warna ideologis membedakan aktivisme keislaman dalam beberapa hal dari aksi-aksi kolektif lainnya yang berorientasi sekular, ia bukanlah *sui generis*, terutama jika dipertimbangkan dinamika, proses, dan organisasi aktivisme itu. Sama halnya dengan aksi-aksi kolektif lainnya, ia rasional dan muncul karena persentuhannya dengan dinamika politik tertentu, melalui proses mobilisasi yang melibatkan jaringan-jaringan

rekrutmen yang rumit dan dipoles dengan sentuhan-sentuhan ideologi melalui framing yang tepat. Dengan meletakkan aktivisme keislaman dalam sudut pandang semacam itu.

Teori ini tepat untuk menganalisis PKS sebagai gerakan sosial. Gerakan sosial di sini dimaksudkan mengenai aksi-aksi kolektif dan peristiwa kolektif yang dilakukan para kader dan simpatisan PKS (Aktivisme Islam). Contohnya aksi kolektif dalam menggugat kebijakan pemerintah, dukungan kepada korban Palestina yang dijajah Israel, dan isu-isu nasional ataupun global lainnya. Teori ini menganalisis tidak hanya dinamika kesejarahan akan tetapi bagaimana proses, organisasi aktivisme yang mengusung bendera Islam. Ia sekaligus memberikan pemahaman bagaimana dinamika, proses, dan organisasi aktivisme keislaman itu dapat dipahami sebagai unsur penentu terjadinya aksi kolektif, yang bekerja melampaui keunikan Islam sebagai sistem makna, identitas, dan basis aksi kolektif.

D. Hipotesa

Pengaruh pemikiran politik Islam oleh Ikhwanul Muslimin terhadap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ditunjukkan pada kesamaan pandangan dalam memaknai demokrasi dan menjalankan fungsi pemerintahan dalam parlemen dengan sistem Syuro.

Ikhwanul Muslimin menyebarkan pengaruh ideologinya ke luar regional wilayahnya di Mesir hingga sampai di Indonesia. Adapun cara-cara transmisi

dan Arab Saudi, ulama-ulama Ikhwan mengajar ke Indonesia ataukah dengan cara lainnya.

Memang sejak embrio PK/PKS pada akhir tahun 1970 hingga dilahirkannya Partai Keadilan Sejahtera sangat tampak sekali pengaruh ideologi Ikhwanul Muslimin dikalangan kader-kader LDK. Kita bisa lihat dari AD/ART PKS dan eksistensi Tarbiyah di kalangan kader PKS hingga kini, karena Tarbiyah itu adalah warisan ideologi Ikhwanul Muslimin. Dan masih digunakan sampai pada saat ini oleh PKS. Di Mesir sendiri, Ikhwanul Muslimin sudah sejak lama menerima demokrasi lewat pengiriman kader terbaik dalam parlemen dalam beberapa pemilihan umum, berafiliasi atau mendukung salah satu partai yang dapat bekerjasama dengan Ikhwanul Muslimin dalam menjalankan visi-misinya, dan perubahan undang-undang yang kontra terhadap syari'at Islam lewat para legislatornya di parlemen. Dan Mantan Presiden Mesir, Muhammad Mursi ketika masih menjabat sebagai Presiden tahun 2012 juga mendirikan sebuah partai yaitu Partai Kebebasan dan Keadilan atau *Freedom and Justice Party (FJP)* yang memenangkan Pemilu Mesir 2012.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data skripsi ini didapat dari beberapa sumber yaitu dengan menghimpun data sekunder dari literatur-literatur yang relevan seperti buku, surat kabar,

Adapun data primer atau data langsung jika memungkinkan maka penulis akan melakukan wawancara langsung dengan narasumber yang terkait dengan tema skripsi ini.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan skripsi ini dipaparkan sebagai berikut:

- BAB I** : Bab ini berisi tentang pendahuluan. Pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, teknik pengumpulan data, dan sistematika penulisan.
- BAB II** : Bab dua membahas tentang Organisasi Ikhwanul Muslimin terutama sejarah singkat pembentukan, pemikiran, pengaruh, periodisasi, dan kontribusinya hingga saat ini.
- BAB III** : Bab tiga membahas tentang Partai Keadilan Sejahtera terutama sejarah singkat pembentukan, pemikiran, pengaruh, periodisasi, dan kontribusinya. Dan membahas, PKS sebagai gerakan politik di Indonesia.
- BAB IV** : Bab empat membahas tentang pengaruh dari Pemikiran Politik Islam Ikhwanul Muslimin terhadap gerakan politik Partai Keadilan Sejahtera terutama poin-poin kesamaan antara Ikhwanul Muslimin dan Partai Keadilan Sejahtera.
- BAB V** : Bab lima berisi kesimpulan, yang menguraikan kesimpulan atas pengaruh Pemikiran Politik Islam Ikhwanul Muslimin terhadap